



RINGKASAN DRAFT JUKNIS PENYUSUNAN RKAKL DITJEN KSDAE TA.2018





Pokok-pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan Pengesahan DIPA



PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

PERBAIKAN KETENTUAN PENGANGGARAN

Perbaikan ketentuan dalam PMK Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA, antara lain (1/2):

- Aplikasi Renja
 - Aplikasi ADIK
- 
- KRISNA

- **Penggabungan aplikasi Renja (Bappenas) dan aplikasi ADIK (DJA) menjadi aplikasi KRISNA dalam penyusunan Renja-K/L dan informasi kinerja anggaran.** Selanjutnya, referensi dalam aplikasi KRISNA akan digunakan sebagai referensi dalam aplikasi RKA-K/L, dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran (Pasal 3 ayat (2));
- Penyederhanaan penataan ADIK dengan melakukan **penyeragaman struktur data antara aplikasi KRISNA dengan aplikasi RKA-K/L**, yaitu dengan menghilangkan output strategis pada level K/L (Pasal 6 huruf b);
- Adanya kewajiban pendanaan anggaran terhadap Nawacita, prioritas nasional, janji Presiden, dan anggaran tematik oleh unit Eselon I (Pasal 6 huruf f), yang harus diteliti oleh Biro Perencanaan (Pasal 9 ayat (2) huruf d), direviu oleh APIP K/L (Pasal 10 ayat (2)), ditelaah oleh mitra kerja K/L (Pasal 15 ayat (1));



Pokok-pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan Pengesahan DIPA



PERBAIKAN KETENTUAN PENGANGGARAN

Perbaikan ketentuan dalam PMK Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA, antara lain (2/2):

- Adanya penyempurnaan penganggaran kendaraan dinas dan penganggaran kegiatan yang dibiayai PHLN;
- Adanya penyempurnaan ketentuan mengenai KPJM, sesuai dengan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan reviu angka dasar tahun anggaran 2018, dan implikasi dari PP No. 17 Tahun 2017;
- Perbaikan format RKA-K/L sesuai dengan aplikasi KRISNA, termasuk adanya tambahan format Tabel Rekap Penandaan Anggaran;
- Perbaikan urutan pelaksanaan reviu APIP K/L sesuai dengan masukan Itjen Kemenkeu;
- Perbaikan ketentuan dan substansi penelaahan, disesuaikan dengan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- Perbaikan format DIPA sesuai dengan penataan informasi kinerja dalam RKA-K/L.





Pokok-pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan Pengesahan DIPA



Perbaikan Pedoman Umum Penyusunan RKA-KL

PENGALOKASIAN ANGGARAN PEMBANGUNAN BANGUNAN/GEDUNG

- Dasar perhitungan alokasi anggarannya dalam RKA-K/L adalah sebagai berikut:

Pekerjaan	Lokasi	Dasar Alokasi
Pembangunan (baru)	Dalam Negeri	Biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian PUPR atau Dinas PU setempat
Renovasi bangunan/gedung negara yang mengubah struktur bangunan	Luar Negeri	Biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian PUPR (dokumen analisis perhitungan dari Kementerian PUPR dapat disusun berdasarkan perhitungan dari konsultan perencanaan negara setempat)
Renovasi bangunan/gedung negara yang TIDAK mengubah struktur bangunan	Luar Negeri	Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari konsultan perencanaan negara setempat

- Dalam hal Satker mengusulkan pembangunan/renovasi bangunan/gedung, besaran volumenya harus mendapatkan persetujuan pejabat eselon I
- Sehubungan dengan masih berlakunya kebijakan Pemerintah terkait dengan moratorium bagi pembangunan gedung kantor, untuk K/L yang memerlukan gedung kantor agar berkoordinasi dengan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan





Pokok-pokok Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan Pengesahan DIPA



KETENTUAN PENGANTIAN KENDARAAN DINAS

- Untuk kendaraan dinas yang secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi atau yang memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi dapat dilakukan penggantian dengan ketentuan bahwa pengadaan kendaraan yang merupakan penggantian kendaraan harus sama jenis (misal: kendaraan roda dua, kendaraan roda empat) dan fungsinya (misal: kendaraan operasional, mobil dinas pejabat) dengan kendaraan yang digantikan.
- Alokasinya dapat dimasukkan ke dalam RKA-K/L dengan syarat:
 1. K/L telah menyampaikan perencanaan kebutuhan BMN ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)-nya (untuk K/L yang sudah diwajibkan menyusun SBSK),
 2. Untuk kendaraan bermotor yang tidak ada SBSK-nya, kondisi kendaraan bermotor dikategorikan rusak berat dalam laporan penatausahaan BMN (SIMAK-BMN),
 3. Untuk kendaraan bermotor pada Perwakilan RI di luar negeri disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di negara setempat.

Catatan:

Pengalokasian anggaran untuk penggantian kendaraan dinas yang secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi atau yang memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi dalam RKA-K/L dilakukan tanpa menunggu selesainya proses penghapusan/lelang kendaraan dinas yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi (dapat dilakukan bersamaan)





PRIORITAS NASIONAL DITJEN KSDAE TAHUN 2018



PN Kesehatan



PN Pariwisata dan Dunia Usaha



PN Ketahanan Energi



PN Pembangunan Wilayah

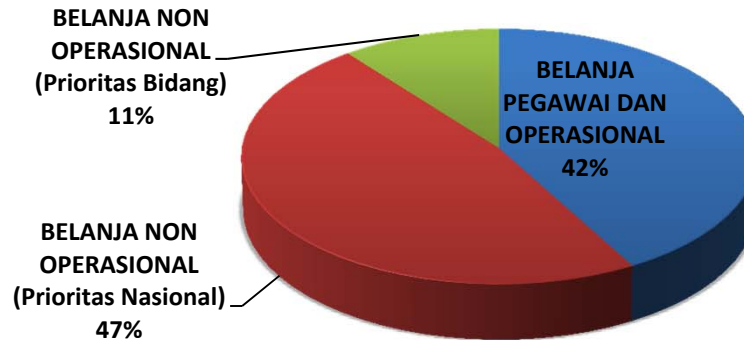
PRIORITAS NASIONAL KSDAE TA 2018

KSDAE
berperan
dalam
4
Prioritas
Nasional
dan
5
Program
Prioritas
Nasional

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Anggaran (Juta Rupiah)
1	Kesehatan	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan (NTD)	20.000
2	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Pengembangan Danau Toba	Penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata	101.790
			Pengembangan Borobudur dan sekitarnya	Penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata	135.182
			Pengembangan Mandalika	Penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata	156.442
3	Ketahanan Energi	Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi	Pengembangan PLT Matahari, Hidro, Tenaga Angin, Arus Laut dan Nuklir	Proyek penyediaan energi berbasis air (mini/mikro hidro) di kawasan konservasi sebesar 1.500 KW	25.150
4	Pembangunan Wilayah	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (antara lain Kebakaran Hutan)	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	86.000
		Pembangunan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di dalam dan sekitar kawasan taman nasional	286.530
				Jumlah Wildlife Rescue Unit yang terbentuk dan beroperasi bersama masyarakat	31.336
				Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan konservasi bersama masyarakat mitra polhut	61.010
				Pemulihan Kawasan Konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat	92.000
	TOTAL				995.440

Pagu Indikatif per Sumber Dana

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal Kementerian LHK nomor S.578/SETJEN/ROCAN/SET.1/5/2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal Pagu Indikatif KLHK Tahun 2018 dan Hasil Trilateral Meeting dengan Bappenas dan DJA tanggal 9 dan 12 Juni 2017



Program dan Sumber Dana		Rincian Anggaran Belanja (dalam ribu rupiah)		
		Operasional	Non Operasional	Jumlah
a	RM (Rupiah Murni)	877.591.529	856.006.367	1.733.597.896
b	RMP (Rupiah Murni Pendamping)	-	3.503.841	3.503.841
c	PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	-	250.789.413	250.789.413
d	HLN (Hibah Luar Negeri)	-	56.554.341	56.554.341
e	SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)	-	51.400.000	51.400.000
TOTAL		877.591.529	1.218.253.962	2.095.845.491



DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun 2018

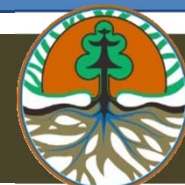
Lampiran Surat Sekretaris Jenderal Kementerian LHK nomor S.578/SETJEN/ROCAN/SET.1/5/2017 tanggal 22 Mei 2017
perihal Pagu Indikatif KLHK Tahun 2018 dan Hasil Trilateral Meeting dengan Bappenas dan DJA tanggal 9 dan 12 Juni 2017

(x Rp. 1.000,-)

No	KEGIATAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA OPERASIONAL	BELANJA PRIORITAS NASIONAL	BELANJA PRIORITAS BIDANG	TOTAL
1	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam				22.141.700	22.091.700
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi			56.150.000	19.881.000	76.031.000
3	Konservasi Spesies dan Genetik			25.256.000	7.559.000	32.815.000
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi				6.760.000	6.760.000
5	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial				5.341.000	5.341.000
6	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati			393.941.000	30.447.000	424.388.000
7	Pengelolaan Taman Nasional			520.093.000	108.500.182	628.593.182
8	Dukungan Manajemen	755.000.000	122.591.529		22.184.080	899.775.609
	Total	755.000.000	122.591.529	995.440.000	222.813.962	2.095.845.491



DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Penajaman Output Prioritas Nasional pada RKP 2018

No	Kegiatan	Jumlah Output 2017	Jumlah Output PRINAS 2017	Jumlah Output 2018	Jumlah Output PRINAS 2018
1	Dukman	1	-	1	-
2	PIKA	6	1	7	-
3	KK	7	6	10	2
4	KKH	11	8	12	2
5	PJLHK	6	3	6	-
6	BPEE	6	1	6	-
7	UPT KSDA	36	22	16	13
8	UPT TN	28	17	21	16
	TOTAL	101	58	79	33

*Catatan: *tidak termasuk output Layanan Internal*



PERUBAHAN OUTPUT PADA RKP 2018



• KEGIATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN TAMAN NASIONAL

Output

- Meningkatnya TSL dan Bioprospecting
- Meningkatnya hasil penangkaran TSL
- Meningkatnya produksi hasil pemanfaatan TSL dari alam

*Menjadi komponen
pada Output*



Output

Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan TSL

Output

- Terbentuknya dan berfungsinya forum kelembagaan pengelolaan Ekosistem Esensial
- Tersedianya paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial

*Menjadi komponen
pada Output*



Output

Kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi

Penambahan Output Prinas

- Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional di Kawasan Danau Toba dan sekitarnya
- Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional di Kawasan Borobudur dan sekitarnya
- Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional di Kawasan Mandalika dan sekitarnya
- Jumlah Wildlife Rescue Unit yang terbentuk dan beroperasi bersama masyarakat dalam rangka pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat

Penambahan Output HLN dan SBSN (Prioritas Bidang)

- Forest Programme II (Development of Integrated Biodiversity Conservation and Watershed Management) BBTN Kerinci Seblat
- Forest Programme III (BBTN Lore Lindu)
- Forest Investment Program - Project 1 (FIP-1) Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum)
- Sarana Prasarana Ekowisata 3 Taman Nasional Model SBSN





Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE

NO.	OUTPUT	KOMPONEN
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Program dan Anggaran - Evaluasi dan Pelaporan - Data dan Informasi - Kerjasama dan Kemitraan - Administrasi Kepegawaian - Administrasi Jabatan Fungsional - Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan - Administrasi Keuangan - Ketatausahaan dan Umum - Administrasi Perlengkapan - Peraturan Perundang-undangan - Pertimbangan dan Advokasi Hukum
2.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja
3.	Layanan Internal (Overhead)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Kendaraan Bermotor - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan - Dukungan Internal Lainnya
4.	Layanan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Gaji dan Tunjangan - Operasional dan Pemeliharaan Kantor





Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

NO.	OUTPUT	KOMPONEN
1.	Rencana Penataan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi Hasil Evaluasi Fungsi Kawasan Konservasi - Penyusunan dan Pengusulan Dokumen Zonasi dan/atau Blok - Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi - Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi - Penyusunan FS dan DED - Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan - Evaluasi Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan - Penilaian METT
2.	Sarana Prasarana pengendalian kebakaran hutan konservasi non taman nasional (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan Konservasi - Kesiapsiagaan terhadap Kebakaran Hutan di Hutan Konservasi - Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan di Kawasan Konservasi
3.	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan konservasi Kawasan Konservasi non Taman Nasional (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dan Verifikasi - Pembentukan dan Pendampingan Kelompok - Bantuan Usaha Ekonomi Produktif - Penanganan Keterlanjuran
4.	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi Kawasan Konservasi non Taman Nasional (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dan Verifikasi - Pembentukan dan Pendampingan Kelompok - Bantuan Usaha Ekonomi Produktif





Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

NO.	OUTPUT	KOMPONEN
5.	Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan konservasi non Taman Nasional dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Patroli Fungsional - Pembentukan dan Penyegaran Masyarakat Mitra Polhut (MMP) - Patroli bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) - Sarana dan Prasarana Resort - Penanganan Barang Bukti dan Tersangka - Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait
6.	Pemulihan Kawasan Konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Pemulihan Ekosistem - Penanaman Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem - Pemeliharaan Tanaman Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem
7.	Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah secara kolaboratif dengan masyarakat (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring 25 Satwa Prioritas - Pembinaan Populasi - Pembinaan Habitat Satwa - Peningkatan Kapasitas SDM - Operasionalisasi Sanctuary
8.	Jumlah Wildlife Rescue Unit yang terbentuk dan beroperasi bersama masyarakat dalam rangka pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Kelembagaan - Penanganan Konflik - Operasional Wildlife Rescue Unit (WRU)/PPS
9.	Jumlah Nilai PNBPN dari Pemanfaatan TSL	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring TSL yang Diperdagangkan untuk Pengusulan Kuota - Patroli dan Peredaran TSL





Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

NO.	OUTPUT	KOMPONEN
10.	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional di Kawasan Danau Toba dan sekitarnya (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Sarpras Pariwisata Pada Kawasan Konservasi di Kawasan Danau Toba - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Penanganan Kunjungan Wisatawan - Promosi Wisata Kawasan Konservasi - Sarana dan Prasarana Berbasis Masyarakat
11.	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional di Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Sarpras Pariwisata Pada Kawasan Konservasi di Kawasan Borobudur dan Sekitarnya - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Penanganan Kunjungan Wisatawan - Promosi Wisata Kawasan Konservasi - Sarana dan Prasarana Berbasis Masyarakat
12.	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional di Kawasan Mandalika dan sekitarnya (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Sarpras Pariwisata Pada Kawasan Konservasi di Kawasan Mandalika dan Sekitarnya - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Penanganan Kunjungan Wisatawan - Promosi Wisata Kawasan Konservasi - Sarana dan Prasarana Berbasis Masyarakat



Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

NO.	OUTPUT	KOMPONEN
13.	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Penanganan Kunjungan Wisatawan - Promosi Wisata Kawasan Konservasi - Sarana dan Prasarana Berbasis Masyarakat
14.	Energi listrik yang dihasilkan dari Mini/Mikro Hidro di Kawasan Konservasi non Taman Nasional (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Kelembagaan - Demplot Microhydro Electrical Powerplant - Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Energi Air
15.	Kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi (Non Prioritas Nasional/Prioritas Bidang)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Kelembagaan - Identifikasi dan Survey Lokasi Potensial KEE - Rencana Aksi - Penyusunan Paket Data dan Informasi KEE
16.	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar 78 poin (Non Prioritas Nasional/Prioritas Bidang)	<ul style="list-style-type: none"> - Program dan Kerjasama - Data Evaluasi dan Kehumasan - Ketatausahaan, Kepegawaian dan Umum
17.	Layanan Internal (Overhead) (Non Prioritas Nasional/Prioritas Bidang)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Kendaraan Bermotor - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan



Pengelolaan Taman Nasional

NO.	OUTPUT	KOMPONEN
1.	Rencana Penataan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi Hasil Evaluasi Fungsi Kawasan Konservasi - Penyusunan dan Pengusulan Dokumen Zonasi dan/atau Blok - Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi - Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi - Penyusunan FS dan DED - Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan - Evaluasi Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan - Penilaian METT
2.	Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi KK di Taman Nasional (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan Konservasi - Kesiapsiagaan terhadap Kebakaran Hutan di Hutan Konservasi - Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan
3.	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan konservasi taman nasional (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dan Verifikasi - Pembentukan dan Pendampingan Kelompok - Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Produktif - Penanganan Keterlanjuran
4.	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi taman nasional (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dan Verifikasi Daerah Penyangga Kawasan - Pembentukan dan Pendampingan Kelompok - Bantuan Usaha Ekonomi Produktif



Pengelolaan Taman Nasional

NO.	OUTPUT	KOMPONEN
5.	Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan Taman Nasional dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Patroli Fungsional Pengamanan Hutan - Pembentukan dan Penyegaran Masyarakat Mitra Polhut (MMP) - Patroli bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) - Sarana dan Prasarana Resort - Penanganan Barang Bukti dan Tersangka - Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait
6.	Pemulihan Kawasan Konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Pemulihan Ekosistem - Penanaman Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem - Pemeliharaan Tanaman Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem
7.	Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah secara kolaboratif dengan masyarakat (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring 25 Satwa Prioritas - Pembinaan Populasi - Pembinaan Habitat - Peningkatan Kapasitas SDM - Operasionalisasi Sanctuary
8.	Jumlah Wildlife Rescue Unit yang terbentuk dan beroperasi bersama masyarakat dalam rangka pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Kelembagaan - Penanganan Konflik - Operasional Wildlife Rescue Unit (WRU)/PPS



Pengelolaan Taman Nasional

NO.	OUTPUT	KOMPONEN
9.	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Taman Nasional di Kawasan Danau Toba dan sekitarnya (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Sarpras Pariwisata Pada Kawasan Konservasi di Kawasan Danau Toba - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Penanganan Kunjungan Wisatawan - Promosi Wisata Kawasan Konservasi - Sarana dan Prasarana Berbasis Masyarakat
10.	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Taman Nasional di Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Sarpras Pariwisata Pada Kawasan Konservasi di Kawasan Borobudur dan Sekitarnya - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Penanganan Kunjungan Wisatawan - Promosi Wisata Kawasan Konservasi - Sarana dan Prasarana Berbasis Masyarakat
11.	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Taman Nasional di Kawasan Mandalika dan sekitarnya (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Sarpras Pariwisata Pada Kawasan Konservasi di Kawasan Mandalika dan Sekitarnya - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Penanganan Kunjungan Wisatawan - Promosi Wisata Kawasan Konservasi - Sarana dan Prasarana Berbasis Masyarakat
12.	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Taman Nasional (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Penanganan Kunjungan Wisatawan - Promosi Wisata Kawasan Konservasi - Sarana dan Prasarana Berbasis Masyarakat





Pengelolaan Taman Nasional

NO.	OUTPUT	KOMPONEN
13.	Energi listrik yang dihasilkan dari Mini/Mikro Hidro di Taman Nasional (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Kelembagaan - Demplot Microhydro Electrical Powerplant - Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Air
14.	Intervensi metode agroengineering di daerah buffer TN Lore Lindu (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan dan Analisis Peta Lokasi Penanaman di Buffer Taman Nasional Lore Lindu - Pengadaan Bibit - Penanaman dan Pemeliharaan di TN Lore Lindu - Peningkatan Kapasitas - Penyadaran Masyarakat dan Visit Scholl - Pembangunan Pembibitan Restorasi Ekosistem Permanen yang dapat Dijadikan Model
15.	Restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di TN Lore Lindu (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Prakondisi Kegiatan Restorasi Kawasan Fokus Schistosoma di Taman Nasional Lore Lindu - Restorasi Kawasan Fokus Schistosoma di Taman Nasional Lore Lindu - Pembangunan Pembibitan Restorasi Ekosistem Permanen yang dapat Dijadikan Model
16.	Pengamanan kawasan TN Lore Lindu (Prioritas Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> - Patroli Fungsional - Patroli Bersama Masyarakat - Pembangunan Pos Pengamanan/Pemantauan Kawasan di Sekitar Area Fokus Sisto - Pembuatan Papan Peringatan - Monitoring dan Evaluasi



Pengelolaan Taman Nasional

NO.	OUTPUT	KOMPONEN
17.	Forest Programme II (Development of Integrated Biodiversity Conservation and Watershed Management) Jambi - BBTN Kerinci Seblat (Non Prioritas Nasional/Prioritas Bidang)	- Forest Programme II (Development of Integrated Biodiversity Conservation and Watershed Management) Jambi - BBTN Kerinci Seblat
18.	Forest Programme III (BBTN Lore Lindu) (Non Prioritas Nasional/Prioritas Bidang)	- Forest Programme III (BBTN Lore Lindu)
19.	Forest Investment Program - Project 1 (FIP-1) Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum) (Non Prioritas Nasional/Prioritas Bidang)	- Forest Investment Program - Project 1 (FIP-1) Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum)
20.	Sarana Prasarana Ekowisata 3 Taman Nasional Model SBSN (Non Prioritas Nasional/Prioritas Bidang)	- Pembangunan Sarana Prasarana Ekowisata Model SBSN
21.	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar 78 poin (Non Prioritas Nasional/Prioritas Bidang)	- Program dan Kerjasama - Data Evaluasi dan Kehumasan - Ketatausahaan, Kepegawaian dan Umum
22.	Layanan Internal (Overhead) (Non Prioritas Nasional/Prioritas Bidang)	- Pengadaan Kendaraan Bermotor - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan



TAHAPAN PENCERMATAN PAGU SATKER LINGKUP DITJEN KSDAE

Pra RAKORNIS / Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran



- Acara penyusunan usulan RKA-KL setiap satuan kerja dengan menyerahkan kelengkapan berkas usulan (Pagu Anggaran)
- Arahan dari DJA
- Pencermatan dari Direktorat Teknis (selaku penanggung jawab kegiatan)
- Pencermatan dari Bappenas
- Pencermatan dari Biro Perencanaan
- Diikuti seluruh satker dan dihadiri Kabag/Kasubag yang mengurus Program dan Anggaran

RAKORNIS



- Arahan teknis dan manajerial dari Direktur Jenderal KSDAE dan Para Direktur lingkup Ditjen KSDAE.
- Arahan-arahan dari Bappenas, Kementerian Keuangan dan narasumber lainnya yang bersifat teknis.
- Dihadiri oleh Kepala Balai Besar/Kepala Balai seluruh satuan kerja lingkup Ditjen KSDAE.

Pemantapan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran



- Finalisasi penyusunan RKA-KL setiap satuan kerja (Pagu Alokasi Anggaran)
- Perbaikan atas penyusunan RKA-KL pagu anggaran serta melengkapi kekurangan-kekurangan dokumen pengusulan anggaran seperti TOR, RAB, dan DED
- Pencermatan oleh APIP, Biro Perencanaan, Bappenas, DJA
- Dihadiri oleh Kabag/Kasubag yang mengurus Program dan Anggaran

ARAHAN UMUM

Yang harus dialokasikan pada RKA:

1. Kebutuhan Biaya Operasional (001 & 002)
2. Kebutuhan untuk kegiatan prioritas nasional (RKP 2018)
3. Kebutuhan tugas dan fungsi satker
4. Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan PHLN (bila ada)
5. Kebutuhan kegiatan lanjutan bersifat tahun jamak (bila ada)
6. Kebutuhan pelaksanaan kegiatan lain yang sesuai dengan peraturan perundangan (bila ada)
7. Kebutuhan dokumen-dokumen perencanaan (FS, DED, Masterplan)
8. Kebutuhan pengalokasian biaya untuk mengikuti pendidikan dasar/pembentukan PEH, Polhut, dan Penyuluh di masing-masing Satker lingkup Ditjen KSDAE, serta Kepala KPHK non TN
9. Setiap UPT perlu mempunyai kegiatan tematik/khas/program unggulan masing-masing UPT sesuai Prioritas Nasional. Kegiatan tematik/program unggulan tersebut harus diselesaikan s.d. Tahun 2018 sebagai kontrak kinerja.



ARAHAN KHUSUS

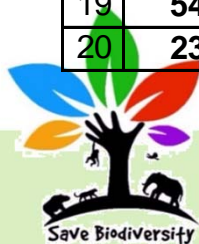
1. Kendaraan yang dilaporkan dalam keadaan Rusak Berat tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan dan harus segera proses penghapusan.
2. Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 untuk Tahun Anggaran 2018 berdasarkan hasil Inventarisasi dikhususkan untuk Satker dengan jumlah kendaraan bermotor roda 4 ≤ 10 unit (diluar yang rusak berat), dengan syarat sbb:
 - a. Satker telah menyampaikan perencanaan kebutuhan BMN ke Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu setempat.
 - b. Penggantian kendaraan harus sama jenis (misal: kendaraan roda dua, kendaraan roda empat) dan fungsinya (misal: kendaran operasional, mobil dinas pejabat) dengan kendaraan yang digantikan.
3. Perjalanan Dinas dan Paket Meeting (akun 524) untuk Satuan Kerja sbb:
 - a) Satker Wilayah Jawa maksimal **10% dari Total Pagu**
 - b) Satker Wilayah Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusra, dan Sulawesi maksimal **12% dari Total Pagu**
 - c) Satker Wilayah Maluku dan Papua maksimal **14% dari Total Pagu**



INVENTARISASI KENDARAAN RODA 4 :

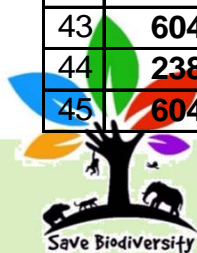
Tabel. Inventarisasi Kendaraan Roda 4 (Empat) lingkup UPT Direktorat Jenderal KSDAE per kondisi

						*update 10 Juli 2017
No	Kode Satker	Satuan Kerja	Baik	Rusak Ringan	Jumlah Baik dan Rusak Ringan	Rusak Berat (akan dihapus)
1	238514	BBKSDA RIAU	29	4	33	10
2	238713	BKSDA BENGKULU	29		29	3
3	238399	BBKSDA JAWA BARAT	25	3	28	2
4	238577	BKSDA KALIMANTAN BARAT	24		24	10
5	239828	BBTN GUNUNG LEUSER	22	2	24	2
6	238603	BTN KUTAI	20	3	23	4
7	238488	BBKSDA SUMATERA UTARA	19	2	21	23
8	238432	BBKSDA JAWA TIMUR	19		19	
9	604189	BTN WAY KAMBAS	18		18	4
10	604240	BTN GUNUNG HALIMUN SALAK	18		18	1
11	238645	BBKSDA SULAWESI SELATAN	13	5	18	
12	604299	BBTN BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM	17		17	10
13	239917	BBKSDA PAPUA	15	2	17	4
14	238467	BKSDA NAD	17		17	2
15	238500	BKSDA SUMATERA BARAT	17		17	1
16	549519	BKSDA KALIMANTAN TENGAH	15	2	17	1
17	238411	BKSDA JAWA TENGAH	14	3	17	
18	239807	BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO	14	3	17	
19	549530	BBTN KERINCI SEBLAT	14	2	16	8
20	238521	BKSDA JAMBI	5	11	16	4



INVENTARISASI KENDARAAN RODA 4 :

No	Kode Satker	Satuan Kerja	Baik	Rusak Ringan	Jumlah Baik dan Rusak Ringan	Rusak Berat (akan dihapus)
21	549544	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	14	2	16	3
22	574318	BTN MANUPEU TANAH DARU DAN LAIWANGI WANGGAMETI	16		16	2
23	604193	BBTN LORE LINDU	12	4	16	
24	549523	BKSDA KALIMANTAN TIMUR	12	4	16	
25	239881	BBKSDA NUSA TENGGARA TIMUR	10	5	15	6
26	238542	BKSDA SUMATERA SELATAN	15		15	5
27	239853	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	14	1	15	2
28	238687	BKSDA BALI	14	1	15	2
29	574313	BTN TESSO NILO	13	2	15	1
30	238446	BTN BALURAN	15		15	
31	427381	BTN BALI BARAT	14		14	3
32	427372	BTN BOGANI NANI WARTABONE	10	3	13	1
33	613150	BKSDA D.I. YOGYAKARTA	13		13	
34	239921	BBKSDA PAPUA BARAT	12	1	13	
35	604201	BTN ALAS PURWO	11	1	12	2
36	238691	BKSDA NUSA TENGGARA BARAT	9	3	12	2
37	445965	BTN SEBANGAU	12		12	
38	238382	BTN UJUNG KULON	11		11	1
39	238598	BKSDA KALIMANTAN SELATAN	11		11	
40	604304	BTN RAWA AOPA WATUMOHAI	10		10	3
41	604172	BTN MERU BETIRI	8	2	10	
42	604371	BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	10		10	
43	604261	BTN WASUR	4	5	9	5
44	238322	BKSDA DKI JAKARTA	6	3	9	4
45	604350	BTN BUKIT TIGA PULUH	9		9	3



INVENTARISASI KENDARAAN RODA 4 :

No	Kode Satker	Satuan Kerja	Baik	Rusak Ringan	Jumlah Baik dan Rusak Ringan	Rusak Berat (akan dihapus)
46	604236	BBTN TELUK CENDERAWASIH	9		9	1
47	604332	BTN GUNUNG PALUNG	7	2	9	1
48	574316	BTN. GUNUNG MERAPI	9		9	1
49	604388	BTN GUNUNG RINJANI	9		9	1
50	604282	BTN BERBAK DAN SEMBILANG	9		9	
51	574317	BTN GUNUNG MERBABU	2	7	9	
52	238652	BKSDA SULAWESI TENGGARA	9		9	
53	238624	BKSDA SULAWESI TENGAH	8		8	4
54	574315	BTN GUNUNG CIREMAI	6	2	8	2
55	445971	BTN KAYAN MENTARANG	7	1	8	2
56	574314	BTN BUKIT 12	8		8	1
57	238666	BKSDA MALUKU	6	2	8	1
58	574325	BTN BANTIMURUNG BULUSARAUNG	8		8	
59	574323	BTN KEPULAUAN TOGEAN	8		8	
60	574311	BTN BATANG GADIS	6	1	7	1
61	604257	BTN KARIMUN JAWA	7		7	1
62	574327	BTN LORENTZ	4	3	7	1
63	604311	BTN KELIMUTU	1	6	7	
64	238581	BTN TANJUNG PUTING	2	4	6	2
65	604278	BTN SIBERUT	6		6	1
66	604222	BTN KEPULAUAN SERIBU	6		6	
67	238610	BKSDA SULAWESI UTARA	5		5	4
68	574326	BTN AKETAJAWA LOLOBATA	4	1	5	1
69	230645	BTN TAMBORA	5		5	
70	604346	BTN TAKA BONERATE	5		5	
71	239895	BTN KOMODO	3	1	4	4
72	604215	BTN BUNAKEN	2	2	4	4
73	604367	BTN MANUSELA	2	2	4	2
74	604325	BTN WAKATOBI	1	2	3	2
Grand Total UPT lingkup Ditjen KSDAE			813	115	928	171



DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM



ARAHAN KHUSUS

4. Pembatasan pembangunan gedung/bangunan baru yang sifatnya tidak langsung menunjang pelaksanaan output prioritas maupun tugas dan fungsi satker **kecuali** bangunan bersifat pelayanan umum seperti: pos jaga, *tourism information center*, perbaikan sarana dan prasarana wisata.
5. Honor Manggala Agni dan Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan untuk TN non DAOPS pada Satuan Kerja **BTN Berbak dan Sembilang, BTN Sebangau, BTN Kutai dan BTN Rawa Aopa** wajib dialokasikan pada output Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi KK di Taman Nasional (anggaran telah dialokasikan).
6. Penyusunan RKAKL **harus sesuai** alokasi per-output (tidak diperkenankan untuk realokasi anggaran antar output, karena sudah dikunci dalam aplikasi KRISNA).



TERIMA KASIH



Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

